

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial;
- b. bahwa Kabupaten Banyuwangi mempunyai kawasan pertanian yang luas dan sumber daya petani yang handal, produk pertanian yang melimpah yang menjadi sumber penghasilan sebagian besar masyarakat Banyuwangi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (6) Undang-Undang No. 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/ IP3A;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 /M – DAG/ PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/SM.200/1/ 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penyuluhan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 22);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 52).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
dan  
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
5. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
6. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
9. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.

10. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
13. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
14. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
15. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
16. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut HIPPA adalah Kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
17. Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GHIPPA adalah beberapa kelembagaan HIPPA yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
18. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
19. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GPPA adalah gabungan beberapa kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
20. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten.
21. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
23. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunggunaan risiko usaha tani.

24. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
25. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
26. Toko Modern adalah toko dengan pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
27. Plasma Nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik.
28. Dinas yang ditunjuk adalah institusi lembaga yang berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana teknis suatu urusan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani.

BAB II  
ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN  
Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
- e. melindungi petani dari praktek perdagangan tidak sehat;
- f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern berkelanjutan; dan
- g. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

#### Pasal 4

Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

### BAB III PERENCANAAN Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - e. jumlah Petani;
  - f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
  - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
  - a. rencana pembangunan nasional;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. rencana pembangunan Pertanian;
  - d. rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
  - e. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Petani, Badan Usaha, mitra Pemerintah, akademisi dan pelaku pasar.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah Daerah menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat kabupaten.

## Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat Strategi Perlindungan Petani dan Strategi Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian;
  - b. kepastian usaha;
  - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - d. menghapus praktek perdagangan yang tidak sehat;
  - e. perlindungan komoditas unggulan strategis dan plasma nutfah;
  - f. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
  - g. sistem peringatan dini, penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam;
  - h. asuransi pertanian;
  - i. bantuan pembiayaan dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual; dan
  - j. kepastian lahan , inventarisasi dan jaminan ketersediaan air sesuai dengan rencana tata tanam.
- (3) strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penelitian dan pengembangan;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. penyuluhan dan pendampingan;
  - d. sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
  - e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
  - f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
  - g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
  - h. penguatan kelembagaan petani; dan
  - i. pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (4) Kebijakan strategi perlindungan petani dan strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan kemampuan keuangan daerah.

## BAB IV PERLINDUNGAN PETANI Bagian Kesatu Umum Pasal 8

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan kepada:
  - a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare.
  - b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
  - c. petani hortikultura, pekebun atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Integrasi dan koordinasi informasi daya serap pasar dan stok produksi hasil pertanian daerah sebagai basis data dari semua pemangku kepentingan.

### Bagian Kedua

#### Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian

##### Paragraf 1

##### Prasarana Pertanian

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Penyediaan Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peningkatan produktifitas dan pengembangan komoditas unggulan strategis antara lain meliputi:
  - a. jalan Usaha Tani, jalan produksi dan jalan desa;
  - b. dam, jaringan irigasi, embung dan Sumber Air Bawah Tanah;
  - c. jaringan listrik, pergudangan dan pasar; dan
  - d. Pelabuhan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan/atau badan usaha dalam memenuhi Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dibutuhkan Petani.
- (2) Pemerintah daerah dan petani wajib memelihara Prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan baik.

##### Paragraf 2

##### Sarana Produksi Pertanian

##### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga yang terjangkau bagi Petani.
- (2) Penyediaan Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peningkatan produktivitas dan pengembangan komoditas strategis paling sedikit meliputi:
  - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan

- b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Pemerintah Daerah membina Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

### Pasal 13

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dibutuhkan Petani.

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakal ternak, pupuk dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu dan tepat jumlah.

## Bagian Ketiga Kepastian Usaha Pasal 15

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah;
- c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

### Pasal 16

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pembelian secara langsung;
  - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
  - c. pemberian fasilitas akses pasar.

### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi dan Penghapusan Praktek  
Perdagangan yang Tidak Sehat  
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi di Daerah.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah menginventarisir dan menindaklanjuti praktik ekonomi biaya tinggi dengan cepat dan transparan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada petani terhadap praktek perdagangan yang tidak sehat.

Bagian Kelima  
Perlindungan Komoditas Unggulan Strategis dan Plasma Nutfah  
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis dan plasma nutfah yang ada di Daerah.
- (2) Penetapan Komoditas unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati meliputi :
  - a. padi;
  - b. jagung;
  - c. kedelai;
  - d. gula;
  - e. cabai;
  - f. durian merah;
  - g. jeruk;
  - h. buah naga;
  - i. kopi;
  - j. kelapa;
  - k. pisang;
  - l. manggis;
  - m. bawang putih;
  - n. bawang merah;
  - o. tembakau;
  - p. kakao;
  - q. ayam;
  - r. kambing; dan
  - s. sapi.

## Pasal 20

- (1) Perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis dan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. menjaga keberlangsungan proses pengembangan dan budidaya; dan
  - b. membudayakan konsumsi produk pertanian lokal.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi plasma nutfah varietas lokal.
- (3) Perlindungan terhadap plasma nutfah diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keenam

#### Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
  - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
  - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

### Bagian Ketujuh

#### Sistem Peringatan Dini, Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam

## Pasal 22

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini, penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g untuk mengantisipasi gagal panen akibat perubahan iklim bencana alam.

## Pasal 23

Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen akibat perubahan iklim dan bencana alam dengan melakukan:

- a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular dan mensosialisasikannya kepada petani;
- b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

## Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Asuransi Pertanian  
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
  - a. bencana alam;
  - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
  - c. wabah penyakit hewan menular;
  - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - e. jenis risiko-risiko lain.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi.
- (4) Ketentuan fasilitasi asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Bantuan Pembiayaan Dan Fasilitasi  
Pendaftaran Kekayaan Intelektual  
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada petani dan/atau penggarap dalam bentuk bantuan pembiayaan dan fasilitasi dalam rangka pendaftaran kekayaan intelektual.
- (2) Kekayaan intelektual yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak cipta;
  - b. paten;
  - c. merek;
  - d. rahasia dagang;
  - e. perlindungan varietas tanaman; dan
  - f. sertifikasi.

Bagian Kesepuluh  
 Inventarisasi dan Jaminan Ketersediaan Air  
 Paragraf 1  
 Inventarisasi  
 Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendataan, pendokumentasian dan pemeliharaan terhadap dokumen petani yang melakukan usaha tani.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas diri petani dan/atau penggarap;
  - b. luas lahan garapan; dan
  - c. lokasi lahan garapan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan dan disimpan oleh Perangkat Daerah yang membidangi untuk melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat bekerja sama dengan Petani dan/atau penggarap, masyarakat dan/atau Badan Hukum lain.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) diatas bukan merupakan dokumen publik.
- (3) Inventarisasi dan Pemanfaatan dokumen petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan secara berkelanjutan.

Paragraf 2

Jaminan Ketersediaan Air sesuai dengan Rencana Tata Tanam  
 Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan air irigasi sesuai dengan rencana tata tanam tahunan.
- (2) Rencana penyediaan air tahunan dibuat oleh instansi teknis tingkat kabupaten/tingkat provinsi berdasarkan ketersediaan air (debit andalan) dan mempertimbangkan usulan rencana tata tanam, rencana kebutuhan air tahunan dan kondisi hidro klimatologi.
- (3) Penyusunan Rencana Tata Tanam Tahunan dilakukan berdasarkan prinsip partisipatif dengan melibatkan peran aktif masyarakat petani, secara aktif petani mendiskusikan komoditas yang akan ditanam bersama dengan petani lain dalam P3A/HIPPA maupun dengan kelompok P3A/HIPPA lainnya, pemerintah bertindak dan berperan sebagai pembimbing atau penasehat yang memberi masukan dan pertimbangan berkaitan dengan ketersediaan air yang mungkin bisa dipergunakan untuk pertanian, Perencanaan tata tanam tahunan terdiri dari :
  - a. Rencana Tata Tanam Global (RTTG); dan
  - b. Rencana Tata Tanam Detail (RTTD).
- (4) Masyarakat, badan usaha dan kelompok pengguna air wajib mematuhi tata tanam dan tata guna air.
- (5) Rencana tata tanam tahunan diatur dalam Keputusan Bupati.

### Pasal 31

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber – sumber air irigasi untuk memenuhi kebutuhan air petani.

## BAB V PEMBERDAYAAN PETANI

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 32

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pemberdayaan Petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

### Bagian Kedua

### Penelitian dan Pengembangan

### Pasal 34

Penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha pertanian agar memberikan nilai tambah, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan lokal.

### Pasal 35

- (1) Penelitian dan pengembangan dapat dilaksanakan oleh perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah.
- (2) Perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:
  - a. sesama pelaksana penelitian dan pengembangan;
  - b. pelaku usaha Pertanian;
  - c. asosiasi komoditas pertanian;
  - d. organisasi profesi terkait; dan/atau
  - e. lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian asing.
- (3) Kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan pertanian asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Kemudahan perizinan penelitian;
  - b. kemudahan pemasukan sarana dan prasarana penelitian dari luar negeri; dan
  - c. penggunaan sarana dan prasarana penelitian dari luar negeri.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b adalah proses pengurusan perizinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

Dalam mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pelaku Usaha pertanian menyediakan fasilitas berupa:

- a. kemudahan perizinan penelitian;
- b. penggunaan sarana dan prasarana pertanian untuk penelitian; dan
- c. kemudahan akses data yang tidak bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pemangku kepentingan di bidang pertanian, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian.
- (2) Perseorangan warga negara asing dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan asing yang akan melakukan penelitian dan pengembangan pertanian harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian ketiga

#### Pendidikan dan Pelatihan

### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
  - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian;
  - c. Pelatihan pemasaran di bidang agribisnis; dan/atau
  - d. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan khusus kepada petani dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 41

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib menerapkan tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan.

### Pasal 42

Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Petani dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

### Bagian Keempat

#### Penyuluhan dan Pendampingan

### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (5) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar Petani dapat melakukan:
  - a. tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha; dan
  - c. kemitraan dengan pelaku usaha.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dapat dilakukan oleh lembaga atau perseorangan yang peduli terhadap kemajuan petani dan pertanian.
- (7) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 44

Setiap orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

## Bagian Kelima Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
  - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
  - e. mewajibkan pelaku usaha toko modern memberi space untuk hasil pertanian dan menjalin kemitraan dengan kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani;
  - f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan;
  - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian baik secara konvensional maupun secara online;
  - h. mendorong pelaksanaan pasar lelang;
  - i. menyediakan informasi pasar baik secara konvensional maupun secara online; dan
  - j. mengembangkan lindung nilai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 46

- (1) Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang mengelola toko modern berkewajiban mengutamakan penjualan Komoditas Pertanian dalam negeri.

### Pasal 47

- (1) Transaksi jual beli Komoditas Pertanian di pasar induk, terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelelangan harus menetapkan harga awal yang menguntungkan Petani.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggara, mekanisme, dan penetapan harga awal pelelangan Komoditas Pertanian dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 48

Komoditas Pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu.

### Pasal 49

- (1) Setiap Petani yang memproduksi Komoditas Pertanian wajib memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Pemerintah Daerah membina Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian.

### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi Komoditas Pertanian dalam negeri.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
  - a. membuat pameran produk pertanian daerah;
  - b. membuat lomba komoditas pertanian unggulan daerah; dan
  - c. mengundang eksportir pada saat panen raya.

## Bagian Keenam

### Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
  - b. jaminan luasan lahan Pertanian.

#### Paragraf 2

### Konsolidasi Lahan Pertanian

### Pasal 52

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian.

- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
  - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

#### Pasal 53

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Jaminan Luasan Lahan Pertanian

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pemberian paling luas 2 hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertanian kepada Petani, yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut.
  - b. pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah memfasilitasi pinjaman modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian.

#### Pasal 55

Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk izin pengusahaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan.

#### Pasal 56

Pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b diutamakan kepada Petani setempat yang:

- a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan Pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
- b. memiliki lahan Pertanian kurang dari 2 (dua) hektare.

### Pasal 57

- (1) Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) wajib mengusahakan lahan Pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.
- (2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah membina Petani yang lahannya sudah dimiliki oleh Petani lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) untuk alih profesi.
- (2) Pembinaan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.

### Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan luasan lahan Pertanian dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
  - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
  - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
  - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

## Bagian Kedelapan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan

- c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

#### Pasal 62

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
  - a. sarana produksi Pertanian;
  - b. harga Komoditas Pertanian;
  - c. peluang, daya serap dan tantangan pasar;
  - d. prakiraan iklim dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
  - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
  - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Penyediaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

#### Bagian Kesembilan Penguatan Kelembagaan Paragraf 1 Umum Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal Petani.

#### Pasal 64

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kelompok Tani;
  - b. Gabungan Kelompok Tani;
  - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
  - d. P3A/HIPPA dan GP3A/GHIPPA.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.

#### Pasal 65

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).

Paragraf 2  
Kelembagaan Petani  
Pasal 66

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan lembaga-lembaga adat Petani yang sudah ada dan memperhatikan keterlibatan Petani perempuan.

Pasal 67

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 68

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya.

Pasal 69

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 70

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 71

Asosiasi Komoditas Pertanian berkedudukan di kabupaten.

## Pasal 72

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berUsaha Tani.

### Paragraf 3

#### Kelembagaan Ekonomi Petani

## Pasal 73

- (1) Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

## Pasal 74

Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

### Bagian Kesepuluh

#### P3A/HIPPA dan GP3A/GHIPPA

## Pasal 75

- (1) P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)/ HIPPA (Himpunan Petani pemakai Air)/ membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan secara individu petani pemakai air dan atau secara kelompok/ gotong royong/ HIPPA, meliputi segala tindakan yang terkait dengan upaya pengoperasionalan, pendistribusian air dan pemeliharaan jaringan irigasi tanpa mengurangi kewenangan dinas teknis terkait.
- (2) GP3A/GHIPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d merupakan gabungan dari beberapa P3A/ HIPPA yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam satu kecamatan atau beberapa kecamatan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 76

Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 77

Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. lembaga pembiayaan.

Bagian Kedua  
Lembaga Perbankan  
Pasal 78

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menugasi Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 79

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Tani, pihak bank berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak bank berperan aktif membantu dan memudahkan Petani mengakses fasilitas perbankan.
- (3) Bank dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk Usaha Tani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis.

Bagian Ketiga  
Lembaga Pembiayaan Petani  
Pasal 81

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berkewajiban menugasi Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 83

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

BAB VII  
PENGAWASAN  
Pasal 84

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Pengawasan perlindungan dan pemberdayaan petani diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 85

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

### Pasal 86

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. Perlindungan Petani;
  - c. Pemberdayaan Petani;
  - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
  - e. pengawasan.

### Pasal 87

Masyarakat dalam Perlindungan Petani dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian dalam negeri;
- c. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana; dan
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 88

Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan nonformal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. pencegahan alih fungsi lahan Pertanian;
- e. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
- f. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan;
- g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi; dan/atau
- h. Penumbuhan generasi muda tani.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 89

- (1) Setiap orang, badan usaha dan kelompok pengguna air yang melanggar ketentuan dalam pasal 44 diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ini terdiri atas:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 90

Peraturan Bupati sebagai Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah, ditetapkan paling lama 6 (enam) Bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi,  
Pada tanggal

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

DJADJAT SUDRADJAT